

Sublimasi Politik dalam Aksi Bela Islam 212

Muh. Ainun Najib

Alumni Pascasarjana Hukum Islam – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
inun.denajib@gmail.com

Abstract

In a certain point, the relationship between religion and state in Indonesia has never been separated from various problems. Political sublimation is a clear example that religious and political affairs in practise have not yet been completed and are predicted to grow in the future. The most recent example is the Action of Defend Islam 212, where if we analyze further, the political interests cannot be separated from it. This paper tries to examine the phenomenon in Jakarta as an example of political sublimation by putting non-political things, in this case religion, into a very politically laden thing. This paper concludes that every event that occurs can have political meaning and purpose. Therefore, a social phenomenon cannot only be seen from one side.

Keywords: *political sublimation, Islam, religion*

Abstrak

Dalam titik tertentu, hubungan antara agama dan negara di Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai masalah. Sublimasi Politik menjadi contoh yang nyata bahwa urusan agama dan politik dalam ranah praktis ternyata belum selesai dan diprediksi akan semakin membesar kedepannya. Contoh paling mutakhir yaitu fenomena Aksi Bela Islam 212, dimana jika kita analisis lebih jauh, muatan-muatan politis tidak bisa dilepaskan di dalamnya. Tulisan ini mencoba mengkaji fenomena 212 di Jakarta sebagai contoh sublimasi politik dengan meletakkan hal non-politis, dalam hal ini agama, menjadi hal yang sangat sarat politis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dapat memiliki makna dan tujuan politis. Oleh karenanya, suatu fenomena sosial tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi saja.

Kata Kunci : *sublimasi politik, islam, agama*

Pendahuluan

Pembahasan mengenai politik selalu menarik untuk di bahas dan di ikuti perkembangannya. Hal tersebut tidak terlepas dikarenakan yang dibahas dalam politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat atau sosial dan juga berkaitan dengan relasi antara satu orang dengan yang lain atau antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Terlebih dalam politik terkadang sulit diprediksi akan suatu peristiwa yang akan terjadi.

Pembahasan mengenai Politik lebih menarik lagi mana kala Oliver Machart dalam suatu tulisannya yang berjudul *Post-Foundational Political Thought* memaparkan istilah "*Politic dan Political*" (Macharat, 2007). Dalam tulisan tersebut Oliver Machart ingin mengajak kita berpikir mengenai politik tidak seperti dari yang biasanya. Oliver Machart mengajak kita membicarakan politik secara "*out of the box*" atau memandang politik dari sudut pandang yang berbeda dan bermacam-macam, berpikir secara mendasar, rasional dan empiris yang oleh nya ia sebut *Post-Foundational*. Oleh karenanya politik menjadi semakin menarik untuk dibicarakan. Dalam tulisannya tersebut Oliver Machart mengatakan bahwa Paul Ricoeur¹ ketika membahas politik membedakan istilah antara politik (*le politique= polity*, pemerintahan) dan political (*la politique, political paradox*). Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan kekuasaan dan kepentingan sebagaimana yang sering kita semua fahami. Sedangkan *Political* adalah untuk menunjukkan istilah kesatuan diluar konflik kelas atau kontestasi politik sebelum sesuatu di katakan sebagai peristiwa politik. Dari kacamata *political* inilah kita bisa memandang bahwa yang namanya politik tidak selamanya berhubungan dengan urusan pemerintahan dan kekuasaan. Akan tetapi segala macam jenis gesekan/kontestasi antar manusia yang bertujuan untuk kepentingan tertentu bisa dikatakan sebagai politik. Oleh karenanya pada tataran *political* inilah politik dianggap menjadi sesuatu yang tidak tetap atau *unfixed*. Hal ini karena kita bisa menggunakan istilah politik pada semua tingkat elemen sosial yang ada. Namun ada beberapa syarat untuk mengatakan bahwa sesuatu itu *unfixed* yaitu bias lingkungan sosial.² Lingkungan di sini bisa kita artikan seperti struktur, kelas ataupun budaya, kemudian *contingency* atau terjadi dalam peristiwa apa dan yang terakhir mempunyai/terdapat dimensi historisitas.

Oliver Machart juga menuliskan pendapat Fred Dallmayr mengenai *politic* dan *political*. Fred Dallmayr menjelaskan kedua istilah tersebut lebih sederhana dan kontras, di mana yang paling reseptif mengenai perbedaan *politic-political*. Dalam hal

¹ Paul Ricoeur adalah filsuf dari Perancis pada abad ke-20. Selain sebagai filsuf, dia juga menyumbangkan pemikiran dalam bidang politik, sosial, kultural, edukatif, dan teologis. Dia termasuk cendekiawan Protestan yang sangat terkenal di Perancis.

² Disampaikan oleh Dr. Hakimul Ikhwan, dosen Ilmu Politik Universitas Gajah Mada pada suatu mata kuliah *Islam, Demokrasi dan Civil Society* di Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.

ini yaitu terdiri dari perbedaan antara 'politik dilihat sebagai pemerintahan (negara) *le politique*' dan 'political dipandang sebagai pembuat kebijakan atau pengambilan keputusan *la politique*.' Sekilas pendapat Fred Dallmayr tersebut lebih mudah untuk dipahami dalam menjelaskan istilah *politic-political*. Namun bagi tokoh filsafat dan politik lainnya definisi tersebut dianggap terlalu *simple*. Karena pembicaraan mengenai political itu sangatlah luas, makanya tidak sesimpel yang dikatakan Fred Dallmayr. Sementara itu Arendt dan Schmitts juga mengutarakan pendapatnya mengenai dua istilah ini. Arendt melihat political sebagai ruang kebebasan dan musyawarah masyarakat. Sedangkan Schmitts melihat sebagai sebuah ruang kekuasaan, konflik dan pertentangan. Banyak sekali tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir politik yang mengungkapkan pendapat mengenai istilah *politic-political* ini. Akan tetapi pada intinya sama, bahwa *political* adalah segala macam jenis kontestasi yang oleh karenanya menjadikan sesuatu hal menjadi *unfixed*.

Untuk menjadikan sesuatu itu dikatakan *unfixed*, harus ada elemen atau istilah yang mengarahkannya kesana. Oliver Machart menjelaskan mengenai Netralisasi, Kolonisasi dan Sublimasi politik. Menurut Schmitt³ dan Arendt dalam buku tersebut, sekarang ini politik menjadi semakin dinetralkan dan terjajah atau tergeser atau istilah lainnya tersublimasi ke dalam domain-domain non-politik. Di zaman serba bebas dan modern seperti sekarang ini politik tidak bisa kita pandang dari satu sudut saja. Politik tidak bisa kita anggap dari apa yang nampak di depan mata karena wujud politik semakin tidak jelas dan absurd. Hal itu dikarenakan semakin ke sini segala macam jenis urusan dimasuki urusan politik. Sehingga sering kita dengar istilah politisasi agama, politisasi pendidikan dan lain sebagainya. Hal itu untuk menunjukkan bahwa ranah non-politik pun bisa dimasuki politik. Semakin ke sini banyak sekali urusan politik sudah di sublimasikan ke dalam hal domain non politik. Oleh karenanya sulit jika kita hanya menggunakan satu kaca mata saja untuk menganalisis bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa politik. Hal ini bisa menjadi kajian keilmuan baru yang menarik untuk dibahas. Hal ini karena melihat politik secara tidak biasanya dan dari berbagai macam sudut

³ Carl Schmitt menulis secara ekstensif tentang *wielding* efektif kekuasaan politik. Karyanya telah berpengaruh besar pada teori politik, teori hukum, filsafat kontinental dan teologi politik yang berkembang belakangan ini.

pandang namun bisa menjadi suatu ironi tersendiri karena banyak sekali urusan non-politik telah bercampur dengan urusan politik.

Di Indonesia sendiri hal semacam itu juga sering kali mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia. Banyak oknum yang memanfaatkan suatu elemen tertentu untuk mewujudkan kepentingan pribadinya. Terlebih ketika masa-masa pemilu, tidak jarang banyak para calon pimpinan daerah memanfaatkan ranah pendidikan, agama dan sosial sebagai daya tariknya dan mendulang suara untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Dalam konteks ini kita tidak akan melihat sebuah politik murni, akan tetapi politik yang telah di sublimasikan ke dalam ranah-ranah lain seperti pendidikan, agama, sosial dan lain sebagainya. Jika kita lihat kejadian-kejadian seperti kunjungan calon ke panti asuhan, blusukan calon ke sekolah-sekolah ataupun pengajian akbar yang ditalangi dana salah satu calon. Hal tersebut belum tentu pasti merupakan kegiatan yang berasaskan atas kepentingan sosial, pendidikan dan agama. Akan tetapi bisa jadi merupakan salah satu langkah untuk mendulang suara dan menjadikan calon tersebut meraih kursi kekuasaan, meskipun kita tidak bisa memfonis semua kegiatan yang berlatar belakangan sosial, pendidikan dan agama memiliki maksud demikian.

Salah satu peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Indonesia yang terjadi baru-baru ini adalah aksi bela Islam "212" di tahun 2016. Aksi tersebut merupakan reaksi terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau yang sering disebut Ahok di kepulauan seribu. Aksi tersebut dinamakan aksi 212 karena aksi tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 bulan 12 atau Desember. Yang menarik dalam kasus ini adalah dalam kasus tersebut bisa menyedot perhatian dan partisipasi banyak kaum muslim untuk bisa ikut melakukan aksi tersebut di Monumen Nasional (Monas) Jakarta dan sekitarnya. Bahkan salah seorang pengamat mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan aksi dengan partisipasi masa terbanyak dalam sejarah sepanjang berdirinya negara Indonesia. Aksi tersebut merupakan aksi bela agama yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI).

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah gerakan tersebut murni aksi bela agama ataukah ada unsur politik di belakangnya. Hal ini karena aksi tersebut

terjadi di saat perpolitikan Jakarta sedang memanas atau ketika di Jakarta sedang akan berlangsung pilkada. Apakah aksi tersebut murni aksi bela agama ataukah aksi bela agama tersebut sengaja dikemas oleh suatu kelompok tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Terlebih, aksi tersebut menuntut salah satu calon kontestan pemilu untuk dipenjara. Jika memang aksi tersebut merupakan aksi politik untuk menjatuhkan seseorang, tentu ini suatu hal yang sangat ironi. Ini karena aksi tersebut sudah berhasil menyedot kepedulian jutaan kaum Muslim untuk membela agamanya. Artinya banyak sekali kaum muslim yang sudah 'terbohongi' dengan aksi politik yang dibungkus dengan agama tersebut. Hal ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk di bahas lebih lanjut secara mendalam.

Beberapa literature telah berupaya mengupas fenomena aksi bela agama tersebut. Dari sudut komunikasi masa, media telah berperan dalam membuat narasi-narasi yang penuh interpretasi. Dalam hal ini media dapat dikatakan melakukan framing pemberitaan (Kurnia, 2017; Nurrohman, 2018). Selain itu, sentiment antar agama juga dapat menjadi persoalan dan tantangan tersendiri dalam proses demokrasi di Indonesia (Masduki, 2018). Namun demikian, hal menarik juga dapat ditemukan dalam kajian komunikasi bahwa aksi tersebut menunjukkan adanya pola-pola hubungan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat. Aksi bela islam, yang juga diikuti oleh sejumlah mahasiswa tersebut (Liberti, 2018), telah meningkatkan kedekatan sesama anggota suatu kelompok muslim (setidaknya yang sepaham) dalam menyuarakan kepentingan mereka (Masithoh & Firdaus, 2017). Untuk memahami fenomena yang dinilai sebagai konservatisme agama ini (Kusman, 2016; Burhani, 2017), maka tulisan ini berupaya memberikan penjelasan alternative dari sudut pandang politik.

Latar Belakang Aksi Bela Islam 212

Aksi 212 merupakan aksi bela agama Islam yang berlangsung pada tanggal 2 Desember 2016 yang telah berhasil menyedot jutaan masa. Aksi tersebut dihadiri oleh jutaan kaum muslim dari penjuru Indonesia. Masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta untuk bisa berpartisipasi dalam aksi tersebut. Ada yang rela menyewa kendaraan seperti bus bahkan rela berjalan kaki ratusan kilometer. Tuntutan dalam

aksi tersebut cuma satu, yaitu menuntut mempercepat proses hukum terhadap dugaan kasus penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa disapa Ahok. Masyarakat menilai lambannya proses hukum terhadap terdakwa Ahok yang oleh karenanya masyarakat melakukan aksi tersebut.

Dilihat dari latar belakangnya, aksi tersebut merupakan respon kaum Muslim Indonesia atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok. Pada suatu kesempatan di kepulauan seribu, secara spontan ketika di wawancara oleh wartawan, Ahok mengatakan bahwa kaum muslimin telah dibohongi oleh surat al-Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok tersebut bermaksud bahwa kebanyakan orang muslim telah digiring untuk tidak memilih dirinya yang non muslim untuk menjadi Gubernur. Hal ini karena dalam al-Maidah ayat 51 dijelaskan larangan menjadikan orang-orang non-Muslim sebagai pemimpin mereka. Ucapan "dibohongi" yang dilontarkan Ahok membuat umat Islam Indonesia marah, karena Ahok dianggap telah melecehkan dan menghina agama Islam. Meskipun pada suatu kesempatan, Ahok sudah meminta maaf. Akan tetapi umat Islam tetap menjalankan aksi tersebut dan menuntut segera dipenjarakan si penista agama Ahok.

Menurut laporan Kapolri Jendral Tito Karnavian, aksi yang berlangsung pada tanggal 2 Desember tersebut bukanlah aksi bela agama yang pertama, namun merupakan aksi bela agama yang ketiga. Sebelumnya sudah pernah terjadi pada tanggal 14 Oktober dan 4 November 2016. Pada aksi bela Agama yang pertama yang terjadi pada tanggal 14 Oktober berlangsung di Balai Kota Jakarta dan menuntut untuk menangkap Ahok. Karena tidak puas dengan aksi tersebut, Habib Rizieq dan ustadz Bahtiar Nastir datang ke Kapolri pada tanggal 18 Oktober dan bertemu langsung dengan Kapolri untuk menangkap Ahok. Tidak lama setelah itu Kapolri melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Merasa kinerja yang dilakukan oleh kepolisian lamban, maka atas nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) mereka melakukan aksi bela Agama yang kedua yang dikenal dengan aksi 411 (4 November). Dalam aksi tersebut jutaan umat Islam dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul di Jakarta menuntut usut tuntas kasus tersebut. Beberapa minggu setelah aksi tersebut Kapolri menetapkan status terdakwa terhadap Ahok

dan melimpahkan kasus tersebut terhadap kejaksaan agar segera di proses secara Hukum. Namun merasa tidak puas, aksi bela agama lanjutan tetap terjadi yaitu aksi 212 (2 Desember). Aksi bela agama tersebut menjadikan Habib Rizieq ketua umum Front Pembela Islam (FPI) sebagai tokoh sentral karena semua aksi ini adalah atas inisiasi beliau untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran.⁴

Sublimasi Politik

Sublimasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna perubahan ke arah satu tingkat lebih tinggi. Intinya sublimasi di sini bermakna adanya suatu perubahan terhadap zat atau benda tersentu. Jika dibawa dalam ranah politik artinya terdapat perubahan wujud terhadap bentuk politik itu sendiri. Dalam hal ini politik bertransformasi ke dalam bentuk yang lain, akan tetapi tujuan utama dan akhirnya adalah politik. Terdapat semacam pemanfaatan oleh politik terhadap bidang atau wujud lain tersebut. Oleh karenanya sering kali kita mendengar istilah politisasi pendidikan ataupun politisasi agama. Hal tersebut adalah termasuk contoh sublimasi dari politik. Dalam istilah politisasi pendidikan, pendidikan dimanfaatkan oleh seseorang yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, bukan lagi urusan bersama terhadap pendidikan itu sendiri. Maka dalam istilah politisasi agama, agama dipolitisasi oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan. Salah satu contoh bentuk politisasi agama sering kali kita lihat ketika pemilu, dimana calon pasangan mengadakan acara pengajian akbar yang ditalangi dari kantong pribadinya. Akan tetapi dalam acara tersebut selain untuk menyebarkan atau syi'ar dan dakwah agama, juga untuk memperkenalkan siapa dirinya, mencari dukungan dan mendulang suara untuk mendapatkan kursi kekuasaan nantinya.

Oliver Machart menyebutkan istilah sublimasi politik termasuk dalam turunan *politic-political*. Istilah sublimasi politik termasuk bagian dari *politic-political* dan digunakan untuk menjelaskan daripada *politic-political* itu sendiri. Artinya sublimasi politik dan *politic-political* merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, kedua istilah tersebut dijelaskan bahwa tidak ada yang *fixed*

⁴ Keterangan Kapolri Tito Karnavian ketika diundang oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyer Club di Tv One.

dalam ranah politik karena politik bisa disublimasikan ke dalam ranah-ranah non politik. Untuk itu kita perlu melihat politik tidak hanya dari satu sudut pandang saja akan tetapi dari banyak sudut pandang.

Analisis Kasus Aksi Bela Agama 212

Politik dalam perkembangannya mengalami perubahan dari masa ke masa. Khususnya dari segi wujud terhadap politik itu sendiri, dimana untuk melihat kasus politik tidak bisa hanya dengan melihat dari satu sudut pandang saja. Kita perlu untuk melihat dari sisi-sisi lain yang mengitarinya, entah itu bisa melihat dari sejarah dari peristiwa tersebut ataupun peristiwa lain yang mengelilinginya. Karena bisa jadi antara satu kasus dengan kasus lain saling berkaitan, meskipun secara kasat mata peristiwa-peristiwa tersebut nampak seperti dua peristiwa yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri. Politik tidak bisa didefinisikan hanya dengan satu peristiwa saja, akan tetapi bisa jadi rangkaian banyak peristiwa yang kesemuanya mengarah pada kepentingan tertentu.

Dalam kasus aksi bela agama 212, jika kita hanya melihat dalam aksi tersebut maka aksi tersebut merupakan aksi bela agama yang menuntut pengusutan kasus penistaan agama. Hal itu bisa kita lihat dari masa yang terlibat, kemudian atribut yang mereka gunakan dan tuntutan yang mereka suarakan yaitu semuanya mengarah atas dasar bela agama. Namun kita perlu melihat juga sisi-sisi atau peristiwa-peristiwa lain di sekitarnya. Aksi tersebut bersamaan dengan pilkada Jakarta yang sebentar lagi akan berlangsung, uniknya lagi tuntutan atau imbas dari aksi tersebut tentunya sangat merugikan salah satu calon pilkada. Entah hal itu merupakan suatu kesengajaan atau tidak yang jelas aksi tersebut sangat mempengaruhi elektabilitas terhadap salah satu Calon gubernur. Kemudian jika dilihat dari segi historisitas konflik, kita tahu dua tokoh utama dalam aksi tersebut adalah Habib Rizieq yang merupakan pelopor aksi (meskipun dalam perkembangannya banyak dukungan kepadanya dan mengatas namakan GNPF-MUI), dan yang kedua Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang merupakan sosok yang dituntut dalam aksi tersebut yaitu penistaan agama. Dua tokoh tersebut sudah terlibat perseteruan yang cukup lama. Beberapa kali dan dalam beberapa kesempatan keduanya berseteru, khususnya masalah mengenai Pemimpin Non-

Muslim. Beberapa kali Habib Rizieq mengatakan larangan memilih pemimpin non-Muslim dengan mengemukakan beberapa dalil baik dari al-Qur'an maupun hadits. Selain itu Habib Rizieq pun tidak menyukai sosok Ahok yang menurutnya terlalu arogan dan kasar yang oleh karenanya tidak layak jika menjadi pemimpin. Entah hal ini berkaitan dengan aksi bela agama 212 tersebut atau tidak, yang jelas kita perlu memperhatikan sisi historisitas dari kasus ini.

Aksi bela agama 212 bukanlah aksi tunggal tanpa aksi-aksi lain di sekitarnya. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi-aksi sebelumnya. Aksi 212 ini merupakan salah satu contoh dari praktek sublimasi politik, karena aksi ini memiliki dimensi historisitas yang mengarah pada kepentingan politik tertentu. Hal ini tentunya merupakan suatu kecerdasan tersendiri bagi si pemilik kepentingan karena bisa memunculkan isu di saat momen dan waktu yang pas. Oleh karenanya aksi ini bisa menyedot perhatian masa dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan tercatat kumpulan masa terbanyak sepanjang sejarah, yang hebatnya aksi ini bertepatan bela Agama. Agama di sini seolah-olah dijadikan kambing hitam dan juga tunggangan oleh seseorang untuk mewujudkan hasrat dan kepentingan pribadi oleh kalangan tertentu. Pemilik kepentingan di sini tidak bisa dikatakan hanya satu orang, akan tetapi bisa banyak orang-orang lain dibelakangannya yang berkepentingan. Oleh karenanya bisa memberikan support dalam bentuk yang lain, misalnya dukungan dana, logistik dan lain sebagainya. Hal seperti inilah yang bisa dikatakan bahwa sesuatu itu tidak *fixed (political)* karena bias lingkungan dan juga bias pemilik kepentingan.

Kesimpulan

Sublimasi politik merupakan politik yang dimasukkan ke dalam domain-domain/ranah non-politik. Ada upaya pemanfaatan secara politik terhadap domain-domain non-politik tersebut. Maka untuk membuktikannya kita perlu melihat peristiwa-peristiwa lain di sekelilingnya. Aksi bela agama 212 sekilas tampak bukan aksi politik atau hanya merupakan aksi bela agama. Akan tetapi ada peristiwa-peristiwa lain di sekelilingnya yang kesemuanya memiliki keterkaitan dengan terjadinya aksi bela agama 212 tersebut. Oleh karenanya aksi bela agama 212 ini bisa dikatakan merupakan aksi politik. Peristiwa-peristiwa atau hal-hal lain yang perlu

kita lihat kaitannya dengan aksi ini adalah aksi ini terjadi di saat suhu perpolitikan di Jakarta sedang memanas karena menjelang Pilkada Jakarta 2017. Kemudian yang kedua, aksi ini memiliki historisitas tersendiri terhadap dua tokoh sentral dalam aksi tersebut. Oleh karena itu, terkait aksi bela agama 212 ini perlu juga kita melihat kejadian-kejadian lain disekitarnya. Kita harus jeli dan teliti dalam memandang suatu peristiwa, karena praktek sublimasi politik sudah banyak terjadi. Yang paling dirugikan adalah mereka-mereka yang tidak tahu menahu mengenai suatu permasalahan akan tetapi 'dipaksa' untuk terlibat demi kepentingan pribadi kalangan tertentu.

Daftar Pustaka

- Burhani, A. N. (2017). Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan. *Jurnal Maarif*, 11(2), 15-29.
- Kurnia, Z. A. (2017). *Analisis Framing Pemberitaan Mengenai "Aksi Damai Bela Islam 212" pada Media Online Kompas.com dan Republika Online*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Thesis)
- Kusman, A. P. (2016) Aksi Bela Islam, Populisme Konservatif dan Kekuasaan Oligarki. *Maarif*, 11, 43-52.
- Liberti, L. (2018). keterlibatan mahasiswa dalam aksi bela islam 212. *Jurnal Perspektif*, 1(4), 22-26.
- Masduki, M. (2018). Masa Depan Studi Agama-Agama Di Indonesia; Pasca Peristiwa Aksi Bela Islam 212. *Toleransi*, 10(1), 1-17.
- Masithoh, D., & Firdaus, M. (2017). Pemaknaan Jihad Bagi Anggota Fpi Riau dalam Aksi Super Damai 212 di Jakarta. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 5(1), 1-13.
- Nurrohman, A. (2018). *Analisis Framing Berita Aksi 212 Di Media Online Kompas.com Dan Republika.co.id* (Doctoral dissertation, Univesitas Pembangunan Nasional" Veteran" Yogyakarta).
- Oliver Macharat. (2007). *Post-Fondational Political Thought*. Skotlandia: Edinburg University Press.